



**PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 1987-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh

**FITRI ANI SIREGAR
NIM. 14 402 00012**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 1987-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**FITRI ANI SIREGAR
NIM. 14 402 00012**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 1987-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

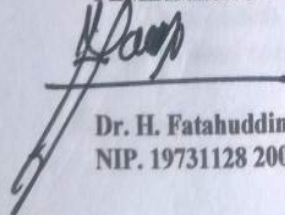
Oleh:

FITRI ANI SIREGAR

NIM. 14 402 00012

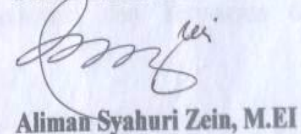
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Aliman Syahuri Zein, M.EI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Fitri Ani Siregar
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 12 Februari 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

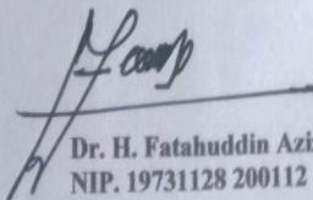
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fitri Ani Siregar yang berjudul "**Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

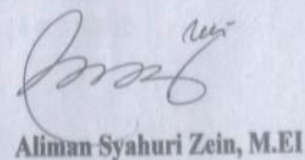
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Aliman Syahuri Zein, M.El

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Ani Siregar
NIM : 14 402 00012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera
Utara Tahun 1987-2016

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Februari 2018

Saya yang Menyatakan,



Fitri Ani Siregar
Fitri Ani Siregar
NIM. 14 402 00012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ani Siregar
Nim : 14 402 00012
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 12 Februari 2018
Yang Menyatakan,



Fitri Ani Siregar
NIM. 14 402 00012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : FITRI ANI SIREGAR
NIM : 14 402 00012
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1987-2016.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Nofinawati, SEL., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : Lulus/ 80 (A)
IPK : 3,77
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1987-2016**

**NAMA : FITRI ANI SIREGAR
NIM : 14 402 00012**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 24 April 2018
Dekan,



[Signature]
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : FITRI ANI SIREGAR
NIM : 1440200012
Judul Skripsi : Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah terdapatnya fenomena penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2005 sebesar 1.018,0 milyar pada saat penanaman modal dalam negeri meningkat sebesar 7.331,394 milyar dan penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar 1.061,03 milyar dimana fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan teori. Apabila investasi meningkat akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan akan menambah pendapatan asli masyarakat yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Rumusan masalah ini adalah apakah terdapat pengaruh antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara secara parsial maupun simultan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel dengan desain *purposive sampling*, data diperoleh melalui situs *www.bps.go.id*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program komputer *Eviews* Versi 9,0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara karena $p\text{-value} < \alpha$ ($0,0025 < 0,05$). Penanaman modal asing memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara karena $p\text{-value} < \alpha$ ($0,0000 < 0,05$). Secara simultan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara karena $p\text{-value} < \alpha$ ($0,000000 < 0,05$). Pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,75 persen sedangkan sisanya sebesar 26,25 persen dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Adapun model regresi di Provinsi Sumatera Utara $PAD = 1696,020 + (0,077344) PMDN + 0,002796 PMA + e$.

Kata Kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Ilahi Rabbi yang masih berkenan menyatukan jasad, ruh dan akal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang menjalankan sunnahnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis sebelum, pada saat dan sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag Wakil Dekan di Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Delima Sari Lubis M.A sebagai sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, S.EI., M.EI selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta seluruh Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan. Khususnya kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Alm. Imran Siregar, Ibunda Irma Wati Batubara karena beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak

melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Abang Arifin dan Wahid yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dan kepada saudara-saudara saya (Midah, Nila, Rahman, Mardianto, Minah dan Nisa) dan keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Santika, Nurliana Sihombing, Mahliga Nasution, Siti Fatimah Tanjung dan Ummi Syarifah, yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan.
11. Ucapan terima kasih untuk teman-teman KKL dan Magang tahun 2017, yang telah memberi semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kekurangan masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi

ini, serta pembuatan skripsi selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Padangsidempuan, Februari 2018

Penulis

FITRI ANI SIREGAR
NIM: 14 402 00012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
---- ِ --	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>hauila</i>
-----	---	--------------	-----	---	---------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبٌ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

- b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN <i>MUNAQASYAH</i> SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Rumusan Masalah	18
E. Definisi Operasional Variabel	18
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Manfaat Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	24
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	24
a. Langkah-langkah Peningkatan Pendapatan Asli	
Daerah.....	27
1) Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah	28
2) Intensifikasi Retribusi Sebagai Pemulihan Biaya	29
3) Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan	
Asli Daerah.....	35
b. Pendapatan Dalam Perspektif Islam	35
2. Pengertian Penanaman Modal.....	38
a. Faktor-Faktor Dalam Melakukan Kegiatan Penanaman	
Modal.....	48

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi ...	53
c. Tujuan Investasi	54
d. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	55
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Kerangka Pikir	62
D. Hipotesis	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	66
B. Jenis Penelitian	66
C. Populasi dan Sampel	66
1. Populasi.....	66
2. Sampel.....	67
D. Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	68
1. Studi Dokumentasi	69
2. Studi Kepustakaan	69
F. Teknik Analisis Data	69
1. Analisis Diskriptif.....	69
2. Uji Normalitas	70
3. Uji Linieritas	70
4. Asumsi Klasik	70
a. Multikolinieritas.....	70
b. Uji Heterokedastisitas.....	71
c. Uji Autokorelasi.....	71
5. Analisis Regresi Berganda	72
6. Uji Hipotesis.....	72
a. KoefesienDeterminasi (R^2).....	72
b. Uji t.....	73
c. Uji F.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara.....	75
2. Kondisi Geografis Sumatera Utara.....	76
3. Kondisi Demografi Sumatera Utara	79
B. Deskripsi Variabel Penelitian	80
1. Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara.....	80
2. Penanaman Modal Di Sumatera Utara	83
C. Hasil Analisis Data Penelitian	85
1. Analisis Deskriptif.....	85
2. Uji Normalitas	86
3. Uji Linieritas	87

4. Uji Asumsi Klasik	88
a. Uji Multikolinieritas.....	88
b. Uji Heterokedastisitas	89
c. Uji Autokorelasi	90
5. Analisis Regresi Berganda	91
6. Uji Hipotesis.....	93
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	93
b. Uji t	95
c. Uji F	96
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	97
1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	99
2. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	102
3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli.....	103
4. Keterbatasan Penelitian.....	104
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	4
Tabel I.2	Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	7
Tabel I.3	Penanaman Modal Asing Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	11
Tabel I.4	Definisi Operasional Variabel.....	19
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel IV.1	Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 km ²	65
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 (Jwa)	79
Tabel IV.3	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	81
Tabel IV.4	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Provinsi Sumatera Utara.....	83
Tabel IV.5	Statistik Deskriptif.....	85
Tabel IV.6	Uji Linieritas	87
Tabel IV.7	Uji Multikolinearitas	89
Tabel IV.8	Hasil Uji White Heteroskedastisitas.....	90
Tabel IV.9	Uji Autokorelasi	91
Tabel IV.10	Analisis Regresi Berganda.....	92
Tabel IV.11	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	94
Tabel IV.12	Uji t.....	95
Tabel IV.13	Uji f.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir	64
Gambar IV.1	Uji <i>Durbin Watson</i>	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016	6
Grafik I.2	Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	10
Grafik I.3	Penanaman Modal Asing Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.....	13
Grafik IV.1	Uji Normalitas <i>Jarque Bera</i> (JB).....	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data BPS pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing
- Lampiran 2 Hasil *Output Eviews* versi 9,0
- Lampiran 3 Tabel *Durbin Watson*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan dan karena adanya faktor-faktor geografis, susunan masyarakat, ikatan-ikatan keagamaan, kebudayaan, adat istiadat, politik, sifat, dan tingkat perekonomian yang berbeda-beda maka sistem yang paling cocok digunakan adalah desentralisasi.

Sebagai negara kesatuan, negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota. Ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berupanya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat. Sebab, kedaulatan negara pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkannya, pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), tetapi harus didistribusikan pada pemerintah desa.¹

Pelaksanaan otonomi daerah di bawah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Karena daerah lebih memahami kondisi dan karakter daerah serta masyarakatnya, setiap kebijakan yang diambil tentu akan lebih menyentuh kepentingan dan sesuai dengan aspirasi

¹Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.81.

masyarakat. Kewenangan yang dimiliki daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah serta pembangunan.

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat proses administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya, dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya.²

Pembangunan ekonomi di daerah harus seiring dengan pembangunan ekonomi nasional sehingga pembangunan di daerah dalam kaitannya dengan era otonomi daerah mampu mempengaruhi perekonomian nasional, dan tentunya tidak bertentangan dengan perencanaan pembangunan nasional. Walaupun daerah diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 150 ayat (1) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu

²Ibid., hlm. 211-212.

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam era otonomi daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya, antara lain lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi yang terletak di pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan. Sumatera Utara dibagi kepada 25 Kabupaten, 8 kota, 325 Kecamatan dan 5.456 Kelurahan/ desa dengan luas wilayah 72.981,23 km² dan jumlah penduduk 14.102.911 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016.³ Sumatera Utara dikenal akan keindahan alamnya yang luas dan kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan hasil laut.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntunan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk melihat pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:

³Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2017* (Medan: BPS, 2017), hlm. 56.

Tabel I.1
Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

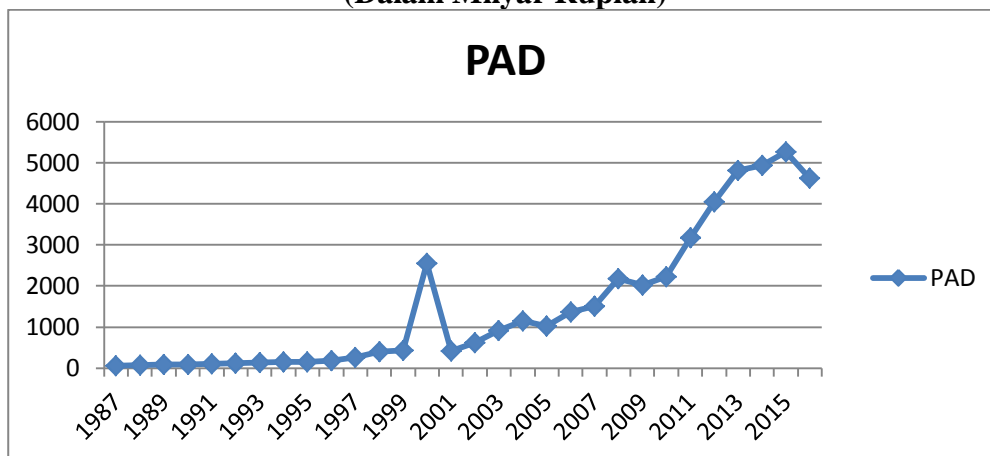
Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1987	56,72366
1988	72,11554
1989	80,69195
1990	90,57194
1991	97,088977
1992	114,283531
1993	131,478085
1994	153,348905
1995	156,514662
1996	187,738013
1997	255,07848
1998	396,469281
1999	437,075216
2000	2.555,1
2001	423,1
2002	614,4
2003	908,3
2004	1.143,1
2005	1.018,0
2006	1.368,2
2007	1.503,0
2008	2.181,3
2009	2.016,07
2010	2.226,50
2011	3.181,89
2012	4.052,10
2013	4.809,37
2014	4.944,50
2015	5.257,67
2016	4.630

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel I.1 di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987 Pendapatan Asli Daerah sebesar 56,72366 milyar rupiah, pada tahun 1988 sampai tahun 1991 mengalami peningkatan dari 72,11554 milyar rupiah sampai 97,088977 milyar rupiah,

pada tahun 1992 mengalami peningkatan sebesar 114,283531 milyar rupiah, pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar 131,478085 milyar rupiah dan pada tahun 1994 sampai 1999 mengalami peningkatan sebesar 153,348905 milyar rupiah sampai 437,075216 milyar rupiah, pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 2.555,1 milyar rupiah, pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 423,1 milyar rupiah, pada tahun 2002 dan 2003 mengalami peningkatan sebesar 614,4 milyar rupiah sampai 908,3 milyar rupiah, pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 1.143,1 milyar rupiah, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 1.018,0 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan sebesar 1.368,2 milyar rupiah sampai 1.503,0 milyar rupiah, pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2.181,3 milyar rupiah, sementara pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2.016,07 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar 2.226,50 milyar rupiah, pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sebesar 3.181,89 milyar rupiah pada tahun 2011 dan sebesar 5.257,67 milyar rupiah di tahun 2015, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4.630 milyar rupiah dari tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik I.1
Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)



Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴

Investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian, setiap negara akan senantiasa berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat menarik perhatian investor untuk melakukan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta

⁴Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 127.

dalam negeri, tapi juga investor asing.⁵ Kegiatan investasi langsung yang berbentuk investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.⁶ Investasi juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Konsep penanaman modal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang sering dikampanyekan oleh pemerintah dalam rangka menarik minat investor baik domestik maupun internasional. Untuk melihat penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.2
Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri
1987	1.865,105
1988	2.516,924
1989	1.712,475
1990	19.608,48
1991	19.437,04
1992	16.857
1993	16.567,83
1994	18.743
1995	19.051,38
1996	20.274,64
1997	21.869,38
1998	15.986,95
1999	7.688,736
2000	9.270,61
2001	11.066,02

⁵Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.132.

⁶Ida Bagus Rahmadani Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indoneaia, 2006), hlm. 10.

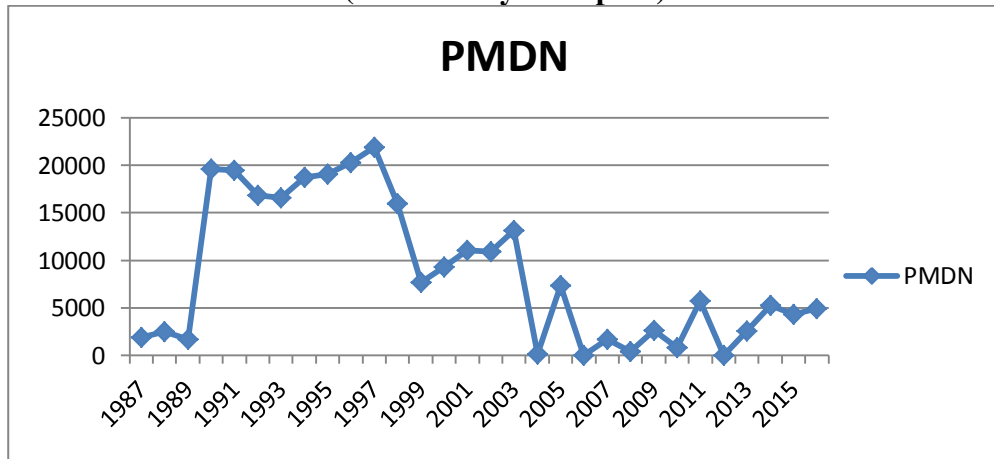
2002	10.926,13
2003	13.163,61
2004	142,4871
2005	7.331,394
2006	0,0516
2007	1.672,463
2008	391,3337
2009	2.644,965
2010	817,9234
2011	5.756,386
2012	23,70167
2013	2.565,871
2014	5.231,906
2015	4.287,417
2016	4.954,829

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel I.2 di atas terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987 sebesar 1.865,105 milyar rupiah, pada tahun 1988 mengalami peningkatan sebesar 2.516,924 milyar rupiah, pada tahun 1989 mengalami penurunan sebesar 1.712,475 milyar rupiah, pada tahun 1990 mengalami peningkatan sebesar 19.608,48 milyar rupiah, pada tahun 1991 mengalami penurunan sebesar 19.437,04 milyar rupiah, pada tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 16.857 milyar rupiah, pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar 16.567,83 milyar rupiah, pada tahun 1994 sampai 1997 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 18.743 milyar rupiah, 19.051,38 milyar rupiah, 20.274,64 milyar rupiah, 21.869,38 milyar rupiah, pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 15.986,95 milyar rupiah, pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 7.688,736 milyar rupiah, pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 9.270,61 milyar rupiah, pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 11.066,02 milyar rupiah, dan pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar

10.926,13 milyar rupiah, pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 13.163,61 milyar rupiah, pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 142,4871 milyar rupiah, pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 7.331,394 milyar rupiah, pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,0516 milyar rupiah, pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 1.672,463 milyar rupiah, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 391.3337 milyar rupiah, pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2.644,965 milyar rupiah, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 817,9234 milyar rupiah, sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 5.756,386 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 23.70167 milyar rupiah, pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan sebesar 2.565,871 milyar rupiah hingga 5.231,906 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4.287,417 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4.954,829 milyar rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik I.2
Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)



Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Tetapi akibat persediaan modal yang sangat kecil ditambah laju pertumbuhan modal yang sangat rendah, maka investasi yang dilakukan oleh mereka menjadi rendah. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus, dan pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan tahap-tahapannya. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa hasil dari pemungutan pajak pada suatu periode belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan pada periode tersebut. Sejalan dengan itu, sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri sering tidak mencukupi atau belum diterima pemerintah pada saat-saat pengeluaran untuk membiayai pembangunan sudah sangat dibutuhkan. Situasi demikian menciptakan perlunya pembiayaan pembangunan ditopang

oleh sumber-sumber dana lainnya seperti dana yang bersumber dari luar negeri.⁷

Oleh sebab itu timbul alternatif lain yaitu aliran dana dari luar negeri yang berupa penanaman modal asing terutama investasi yang dilakukan perusahaan swasta asing. Penanaman modal asing diharapkan dapat mengatasi kekurangan modal, keterbelakangan teknologi, dan sekaligus meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian. Investasi asing dapat memajukan sektor-sektor utama dalam ekonomi, terutama industri dan perdagangan jasa.⁸ Untuk melihat penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel I.3 sebagai berikut:

Tabel I.3
Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Asing
1987	10,63
1988	105,12
1989	12,94
1990	1.118,95
1991	97,93
1992	266,59
1993	117,51
1994	44,56
1995	1.547,9
1996	143,04
1997	285,54
1998	655,39
1999	423,28
2000	668,43
2001	422,21

⁷Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 71-72.

⁸Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66.

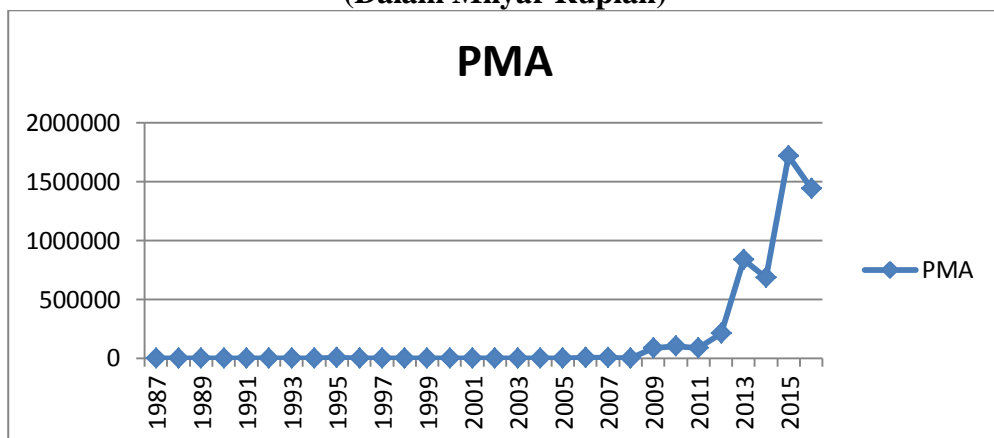
2002	186,18
2003	699,03
2004	935,43
2005	1.061,03
2006	5.466,31
2007	2.325,23
2008	811,33
2009	85.830,62
2010	102.278,1
2011	86.026,72
2012	211.138,1
2013	836.513,4
2014	682.815,2
2015	1.717.993
2016	1.438.865

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel I.3 di atas dapat dilihat bahwa penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987 sebesar 10,63 milyar rupiah, pada tahun 1988 mengalami peningkatan sebesar 105,12 milyar rupiah, pada tahun 1989 mengalami penurunan sebesar 12,94 milyar rupiah, pada tahun 1990 mengalami peningkatan sebesar 1.118,95 milyar rupiah, pada tahun 1991 mengalami penurunan 97,93 milyar rupiah, pada tahun 1992 mengalami peningkatan sebesar 266,59 milyar rupiah, pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar 117,51 milyar rupiah, pada tahun 1994 mengalami penurunan sebesar 44,56 milyar rupiah, pada tahun 1995 mengalami peningkatan sebesar 1.547,9 milyar rupiah, pada tahun 1996 mengalami penurunan 143,04 milyar rupiah, pada tahun 1997 mengalami peningkatan sebesar 285,54 milyar rupiah, pada tahun 1998 mengalami peningkatan sebesar 655,39 milyar rupiah, pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 423,28 milyar rupiah, pada tahun 2000 mengalami

peningkatan sebesar 668,43 milyar rupiah, pada tahun 2001 sampai 2002 mengalami penurunan sebesar 422,21 milyar rupiah dan 186,18 milyar rupiah, pada tahun 2003 sampai 2006 mengalami peningkatan yaitu sebesar 699,03 milyar rupiah, 935,43 milyar rupiah, 1.061,03 milyar rupiah, dan 5.466,31 milyar rupiah, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 811,33 milyar rupiah, pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 85.830,62 milyar rupiah, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 102.278,1 milyar rupiah, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 86.026,72 milyar rupiah, sementara pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan sebesar 211.138,1 milyar rupiah menjadi 836.513,4 milyar rupiah, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 682.815,2 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar 1.717.993 milyar rupiah menjadi 1.438.865 milyar rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik I.3
Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)



Berdasarkan tabel dan grafik di atas bahwa penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun tertentu. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran investor asing dalam menanamkan modalnya secara langsung setelah diberlakukannya UU otonomi, karena daerah memiliki kewenangan yang penuh dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi.⁹

Dalam pelaksanaan otonomi daerah berbagai upaya dan terobosan dilakukan daerah dalam meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber pendapatan (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.¹⁰

Oleh sebab itu, untuk lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di suatu daerah maka pemerintah daerah menawarkan untuk membuka peluang investasi baik dalam negeri maupun pihak asing, karena dapat membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.¹¹

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung dalam teori ekonomi makro investasi secara fisik adalah dalam bentuk barang modal (pabrik dan peralatan), bangunan dan persediaan barang. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang

⁹Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 67.

¹⁰H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 154.

¹¹Utang Rosidin, *Op. Cit.*, hlm. 50.

modal. Yang dimaksud dengan stok barang modal (barang modal tersedia) adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian, pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah penghitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan perunit barang modal. Dengan demikian barang modal merupakan konsep stok, karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu.¹²

Berdasarkan teori dari Prathama Rahardja dan Mandala Manurung tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah sangat besar, oleh karenanya apabila investasi (penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing) dapat masuk ke dalam suatu daerah, maka akan memberikan dampak semakin luasnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah.

Dapat dilihat bahwa kegiatan pokok yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan, termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi.¹³

Harry W. Richardson dalam buku “Ekonomi Regional Teori dan Aspek” menyatakan bahwa perekonomian daerah bersifat terbuka. Artinya faktor-faktor produksi/ hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran-kebocoran dalam menyedot *output* daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat

¹²Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 270.

¹³Utang Rosidin, *Op. Cit.*, hlm. 215.

membantu menyedot *output* kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut.¹⁴

Menurut Hendry Faizal Noor meningkatnya investasi akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan (mengurangi pengangguran) di tengah masyarakat, dan bertambahnya pendapatan asli masyarakat, berkurangnya kemiskinan serta meningkatnya pendapatan negara, yang digambarkan oleh meningkatnya peran pendapatan asli negara (baik dari pajak maupun di luar pajak).¹⁵ Menurut Said Sa'ad Marthon investasi yang dilakukan bisa diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat.¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka daerah diharapkan mampu menarik perhatian para investor, investasi yang dilakukan akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu daerah. Karena investasi dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan dapat menambah keuangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membayar pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2005 di Provinsi Sumatera Utara, saat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat sebesar 7.331,394 milyar, Penanaman

¹⁴Robinson Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁵Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm.64.

¹⁶Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 142.

Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 1.061,03 milyar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar 1.018,0 milyar. Dari data yang telah diperoleh pada tahun 2005 sangat bertolak belakang dengan pemaparan teori yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Apabila investasi meningkat maka akan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pemaparan dan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas masalah-masalah yang peneliti temukan adalah:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri yang meningkat diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah
2. Penanaman Modal Asing yang meningkat diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah
3. Pendapatan Asli Daerah yang menurun diikuti dengan penanaman modal yang meningkat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dibatasi pada tiga variabel yaitu dua variabel bebas penanaman modal dalam negeri

(X_1), penanaman modal asing (X_2), dan satu variabel terikat pendapatan asli daerah (Y). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah data penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah pada tahun 1987 sampai 2016 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016?

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat suatu variabel yang dapat diukur. Dapat pula dikatakan sebagai suatu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengukur suatu variabel.¹⁷

¹⁷Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 147.

Tabel I.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1)	Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	1. Aspek penanaman modal berasal dari dalam negeri. 2. Sumber modal berasal dari dalam negeri.	Rasio
Penanaman Modal Asing (X_2)	Penanaman Modal Asing adalah usaha yang dilakukan pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui penciptaan suatu produksi ataupun jasa.	1. Aspek penanaman modal berasal dari luar negeri. 2. Sumber modal berasal dari luar negeri.	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan yang sah	Rasio

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Povinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang materi mengenai pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman penelitian melalui telaah literatur dan data.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, pendapatan asli daerah.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan referensi dan menambah kepustakaan. Karena keterbatasan penelitian, selanjutnya diharapkan agar lebih dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulisan laporan hasil penelitian ini disusun kepada beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Identifikasi masalah yaitu berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian serta pentingnya masalah tersebut diteliti dan dibahas, peneliti memulai uraian-uraian dari konsep ideal yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dilanjutkan dengan uraian-uraian yang memaparkan fenomena-fenomena umum dalam realitas lapangan yang bertentangan dengan konsep ideal atau teori. Kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan-kesimpulan penyebab terjadinya masalah tersebut.

Batasan masalah yaitu peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu pada aspek masalah yang dianggap dominan dan urgen. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus mengenai masalah peneliti.

Definisi operasional variabel yaitu menjelaskan secara operasional tentang setiap variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian penjelasan definisi operasional variabel ini akan mengemukakan indikator-indikator variabel yang akan diteliti. Tujuan peneliti yaitu jawaban atas rumusan masalah dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

Manfaat penelitian yaitu memaparkan dan menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini dapat dijelaskan dalam tiga bentuk,

yakni manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi dunia akademik.

BAB II Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka teori adalah pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan konsep atau teori yang diambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu memuat beberapa penelitian-penelitian dari orang lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir yaitu memaparkan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah yang akan diteliti. Hipotesis yaitu jawaban sementara dari hasil kerangka teori. Kemudian akan di uji kebenarannya melalui hasil analisis data.

BAB III Metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lokasi dan waktu penelitian yaitu uraian yang menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian terakhir. Jenis penelitian menjelaskan pendekatan yang dilakukan berupa penelitian kuantitatif.

Populasi dan sampel yaitu ada hubungannya dengan generalisasi. Namun bila jumlah populasi sedikit, maka tidak ada penepatan sampel. Bila jumlah populasinya besar, dapat ditetapkan sampel sesuai dengan aturan yang ada dalam metode penelitian. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian

pustaka, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku yang menjadi sumber data. Analisis data adalah menggunakan Eviews 9.0.

BAB IV Terdiri dari hasil penelitian Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016.

BAB V Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu. Kesimpulan memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang disimpulkan dari hasil penelitian pada BAB IV. Saran-saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan dunia akademik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut.¹

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

¹Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 325-326.

dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian dari laba Perusahaan Milik Daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

- 4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/ jasa.
- b. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, yaitu berupa:
- 1) Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi).
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri.
 - 3) Dana Alokasi (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah), yaitu berupa:

- 1) Dana hibah
- 2) Dana darurat
- 3) Dana penyesuaian dan dana otsus
- 4) Bantuan dari daerah yang lebih atas (Provinsi) atau daerah lain.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada didaerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperoleh oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap daerah tidak memiliki pendapatan asli daerah yang sama karena potensi daerah dan kemampuan pengelolaan yang dimiliki daerah berbeda-beda, meskipun daerah diberi otonomi seluas-luasnya.² Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin

²*Ibid.*, hlm. 326.

tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Semakin mampu masyarakat dalam membayar pajak maka semakin meningkat pendapatan asli daerah yang diperoleh. Dalam model interregional (perluasan dari teori basis) menyatakan bahwa pentingnya pemasukan dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya kesuatu daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.³ Menurut Robinson Tarigan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga hal yaitu investasi, perbaikan metode kerja, dan peningkatan kerajinan atau jam kerja.⁴

Penggunaan dana pembangunan daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan manajemen organisasi pembangunan daerah. Dana pembangunan harus benar-benar dapat dihimpun dengan baik dan lancar, semakin bertambah besar dan pada gilirannya dapat digunakan secara efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.⁵

a. Langkah-Langkah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka hendaknya langkah-langkah berikut diperhatikan.

³Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 64.

⁴*Ibid.*, hlm. 66-67.

⁵Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

1) Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

Jenis instrumen keuangan daerah sebagai penerimaan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran dibawah ini, yaitu untuk membiayai investasi total, untuk membiayai pembayaran hutang, menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi masa depan.⁶ Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi, dengan koefisien beban yang

⁶Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 5-6.

ditanggung masyarakat.⁷ Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

Pajak provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air contohnya kapal laut
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.

Pajak kabupaten/ kota, terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak lampu jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir
- h) Pajak lain-lain.⁸

2) Intensifikasi Retribusi sebagai Pemulihan Biaya

Secara normatif, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

⁷*Ibid.*, hlm. 6.

⁸Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 12-13.

disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia, merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.

Penaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*costrecovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi umumnya bersifat proporsional, dimana tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen. Namun demikian di beberapa daerah yang maju, misalnya di Jakarta, besarnya retribusi untuk jasa dan prasarana tertentu, seperti pelayanan air bersih cenderung bersifat progresif, dimana semakin banyak konsumsi air bersih akan semakin tinggi tarif retribusinya. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah berasal dari retribusi perizinan, parkir, dan pasar.⁹ Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

⁹Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

a) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁰

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- (6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan

¹⁰Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- (2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
 - (3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - (5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - (6) Retribusi pelayanan pasar
 - (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - (10) Retribusi pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹¹

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

¹¹*Ibid.*, hlm. 15.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - (2) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
 - (3) Retribusi tempat pelelangan
 - (4) Retribusi terminal
 - (5) Retribusi tempat khusus parkir
 - (6) Retribusi tempat penginapan/ persingahan/ villa
 - (7) Retribusi penyedotan kakus
 - (8) Retribusi rumah potong hewan
 - (9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - (10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - (11) Retribusi penyeberangan di atas air
 - (12) Retribusi pengolahan limbah cair
 - (13) Retribusi penjualan produksi daerah
- c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹²

- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi

¹²*Ibid.*, hlm. 16.

- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
- (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi izin gangguan
- (4) Retribusi izin trayek

Objek retribusi daerah terdiri dari:

- (1) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (3) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹³

3) Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya. Baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

b. Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Kegiatan utama ekonomi pada awal perkembangan Islam meliputi perdagangan, kerajinan tangan pertanian, dan peternakan. Pendapatan dari dua kategori pertama dapat diuangkan dalam dirham dan dinar yang merupakan unit moneter pada awal perkembangan Islam.¹⁴ Langkah pertama yang diterapkan Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan di Madinah

¹³*Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁴Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought, 2001), hlm. 71.

antara lain adalah mendorong kaum Anshar dan kaum Muhajirin untuk melaksanakan *Muzara'ah* dan *musaqat*. *Muzara'ah* adalah akad kerjasama atau pencampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Jenis-jenis *muzara'ah* ada dua yaitu pertama *muzara'ah* ialah kerjasama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik lahan. Kedua *mukhabarah* ialah kerjasama pengolahan lahan dimana benih berasal dari si penggarap.¹⁵ *Musaqat* adalah bentuk sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan.¹⁶ *Muzara'ah* dan *musaqat* adalah mengolah lahan di ladang dan kebun kaum Anshar tanpa mengakui hak kepemilikan. Langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW di satu sisi memberikan pekerjaan bagi kaum Muhajirin, dan sisi lain mendorong peningkatan aktivitas produksi sehingga hasil produksi lahan kaum Anshar pun meningkat sehingga dari hasil kerja sama kedua kaum tersebut dapat meningkatkan pendapatan kaum muslim.

Tindakan lain yang dilakukan Nabi adalah membagikan tanah pada kaum Muhajirin untuk pembangunan rumah yang disebut dengan “persetujuan pembagian tanah” dapat meningkatkan kegiatan pembangunan kaum muslimin dan memenuhi salah satu kebutuhan dasar kaum Muhajirin. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan

¹⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 56.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 57.

produksi adalah membagikan tanah yang ditinggalkan Bani Nadhir pada kaum Muhajirin dan dua orang kafir dari kaum Anshar.¹⁷

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah*. *Falah* berasal dari kata *falḥ*, bentuk verbalnya *falah*, *yuflihu* berarti berkembang pesat, menjadi bahagia, memperoleh keberuntungan, kemenangan atau kesuksesan.¹⁸ Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *falah*, kesejahteraan yang sebenarnya. Kesejahteraan sering diwujudkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang tinggi. Akan tetapi peningkatan pendapatan masyarakat bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan ia hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition*. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani di mana roh

¹⁷Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 72-73.

¹⁸Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 74.

merupakan esensi manusia.¹⁹ Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam.²⁰

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dilihat dari kesejahteraan dunia saja akan tetapi harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dimana Islam selalu menyarankan manusia untuk beribadah seperti mengerjakan shalat. Pada saat selesai menegakkan shalat manusia diperintahkan untuk mencari karunia Allah di muka bumi. Untuk kehidupan dunia *falah* mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat *falah* mencakup tiga pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.²¹

2. Pengertian Penanaman Modal

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam teori ekonomi,

¹⁹Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

²⁰*Ibid.*, hlm. 197.

²¹Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 75.

investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.²² Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa investasi adalah menanamkan sejumlah uang atau modal yang dimiliki oleh investor yang akan ditanamkan kepada perusahaan terbuka untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal disebutkan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.²³ Kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dampak investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi, kegiatan investasi berhubungan langsung dan sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang rasional berlomba-lomba mengedepankan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha dan atraktif untuk menarik modal.²⁴

Manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi menurut Dumairy dalam buku “Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal” adalah: Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi.

²²Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 183-184.

²³Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

²⁴Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 65.

Dengan posisi semacam ini, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika dari investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa investasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan. Dengan investasi pertumbuhan ekonomi akan tercapai karena investasi dapat mendorong aktivitas perekonomian seperti kegiatan produksi, industri, maupun jasa-jasa perdagangan lainnya.

Untuk mengkoordinir penanaman modal di bentuk suatu lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penanaman modal yang dilakukan di daerah-daerah juga memiliki lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).²⁶ Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan tentang Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1968, yang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Berdasarkan sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

²⁵Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 163.

²⁶Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 15-16.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.²⁷ Pengertian modal dalam negeri menurut Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1968 adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.²⁸

Kriteria penanaman modal dalam negeri harus memenuhi 2 unsur utama. Unsur pertama adalah penanaman modal harus berasal dari dalam negeri sedangkan unsur kedua adalah sumber modal tersebut harus berasal dari dalam negeri. Penetapan kedua unsur tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa penanaman modal yang dalam catatan administrasi tergolong sebagai penanaman

²⁷Aminuddin Ilmar. *Loc. Cit.*

²⁸Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 43.

modal dalam negeri memang benar-benar murni sebagai penanaman modal dalam negeri, dan tidak berasal dari sumber-sumber lain.²⁹

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh berbagai sumber seperti perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Penanaman modal dalam negeri pada dasarnya lebih ditujukan bagi penanaman modal swasta/ non pemerintah.³⁰

Kebijakan dalam penanaman modal dalam negeri untuk terciptanya iklim penanaman modal yang sehat dimasa-masa mendatang adalah:³¹

- 1) Mengurangi biaya ekonomi tinggi pada tiap-tiap tahapan penanaman modal
- 2) Memperbaiki kebijakan penanaman modal, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan penanaman modal, serta reformasi kelembagaan penanaman modal.
- 3) Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi), dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

²⁹*Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁰*Ibid.*, hlm. 48.

³¹*Ibid.*, hlm. 50-51.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tidak menafikkan perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri, seperti terlihat dari hal-hal sebagai berikut:³²

- 1) Pada pasal 13 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- 2) Pada pasal 13 ayat (2) UU tersebut diatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Dalam pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri telah ditentukan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri. Bidang usaha tersebut meliputi rehabilitas, pembaruan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang:

- 1) Pertanian
- 2) Perkebunan
- 3) Kehutanan

³²*Ibid.*, hlm. 52.

- 4) Perikanan
 - 5) Peternakan
 - 6) Pertambangan
 - 7) Perindustrian
 - 8) Pengangkutan
 - 9) Perumahan rakyat
 - 10) Kepariwisataaan
 - 11) Sarana dan prasarana, dan
 - 12) Usaha-usaha produktif lainnya
- b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Munculnya penanaman modal asing pertama sekali diawali pada saat meletusnya revolusi industri di daratan Eropa khususnya Inggris pada tahun 1760-an, yang kemudian menjalar ke benua Amerika pada tahun 1860-an. Sejarah penanaman modal asing di Indonesia relatif baru. Awal dari penanaman modal asing di Indonesia dimulai dengan terbitnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari daratan Eropa ke Hindia Belanda untuk ditanamkan ke bidang perkebunan.³³

Dimana dijelaskan dalam pasal 1 pengertian dari pada Penanaman Modal Asing adalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan

³³*Ibid.*, hlm. 55-56.

ketentuan-ketentuan Undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung mengandung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing dalam pasal 2 disebutkan adalah:

- 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- 2) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- 3) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini untuk membiayai perusahaan di Indonesia.³⁴

Investasi yang dilakukan oleh pihak asing juga merupakan sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbeda halnya bantuan maupun pinjaman yang diterima dari luar negeri lazimnya berbentuk tunai, dalam hal ini dana milik pihak asing tidak diberikan kepada pemerintah tetapi langsung ditanamkan pemiliknya kedalam investasi di Indonesia sesuai dengan pilihannya. Pada umumnya investasi asing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan tentunya risiko yang terdapat pada investasi asing

³⁴Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

tersebut akan di tanggung oleh pemilik dana. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Oleh pihak asing (baik oleh perseorangan maupun oleh badan hukum) kedalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing, atau
- 2) Dengan menggabungkan modal asing dengan modal nasional dalam bentuk *joint venture* merupakan kerja sama yang dilakukan antara penanam modal asing dengan pengusaha nasional berdasarkan suatu ikatan kontrak tanpa membentuk suatu badan hukum baru, *joint enterprise* mewujudkan kerja samanya dengan pembentukan suatu perusahaan/ badan hukum baru, dan kontrak karya merupakan kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal nasional melalui pembentukan badan hukum Indonesia, dan badan hukum yang dibentuk tersebut selanjutnya mengadakan perjanjian kerja sama dengan sebuah badan hukum lain yang mempergunakan modal nasional.

Investasi asing dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Investasi secara langsung dilakukan dengan membentuk perusahaan sendiri, menyediakan modal, serta menjalankan perusahaan tersebut, sedangkan investasi tidak secara langsung dilakukan oleh pihak asing dengan cara membeli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau unit pemerintah

diIndonesia.³⁵ Investasi asing yang bersifat sebagai pelengkap tidak boleh menyaingi dan mematikan usaha yang dijalankan oleh investor dalam negeri terutama investor kecil dan menengah.

Penanaman modal asing sangat dibutuhkan untuk merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:³⁶

- 1) Bahwa kekuatan ekonomi potensial dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh ketiadaan modal, pengalaman, dan teknologi.
- 2) Bahwa pancasila adalah landasan dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.
- 3) Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui kegiatan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
- 4) Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus

³⁵Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁶*Ibid.*, hlm. 62-63.

didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.

- 5) Bahwa asas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan keahlian yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan bagi kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan kebergantungan kepada luar negeri.
- 6) Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

a. Faktor-faktor Dalam Melakukan Kegiatan Penanaman Modal

1) Risiko Menanam Modal

Resiko menanam modal merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satunya adalah aspek stabilitas politik dan keamanan karena tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan pada negara dimana investasi dilakukan, maka risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar.

Disamping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang dan keadaan alam yang buruk
- b) Aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam
- c) Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, perpanjangan hutang luar negeri, keadaan memburuk di neraca pembayaran
- d) Aspek lain yang menjadi perhatian adalah aspek jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum, karena terbukti bahwa salah satu kemerosotan investasi langsung diakibatkan oleh tidak adanya jaminan dan kepastian hukum.

2) Rentang Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya tambahan yang akan memberatkan para calon pemodal karena mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak *feasible*.

3) Transparansi Dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan. Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang sering kali mengakibatkan biaya yang cukup mahal contohnya berubah-ubah daftar skala prioritas serta *negative list* di bidang penanaman modal.

4) Alih Teknologi

Peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanaman modal, karena bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut, kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.

Sementara itu, bagi negara tuan rumah, dalam upaya melakukan proses alih teknologi biasayanya mencari perusahaan dari negara yang longgar dalam aturan mengenai kemungkinan melakukan proses alih teknologi.

5) Jaminan Dan Perlindungan Investasi

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya suatu peristiwa, seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan, nasionalisasi, serta pengambil alihan. Jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal serta penarikan keuntungan.

6) Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi, akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal. Penanaman modal dengan ketenagakerjaan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.

7) Ketersediaan Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan

penanaman modal, hal itu menjadi faktor penting sebagai pertimbangan bagi para calon investor. Tersedianya infrastruktur pokok seperti, perhubungan (darat, laut, dan udara), energi, serta sarana komunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperhatikan oleh calon investor.

8) Keberadaan Sumber Daya Alam

Disamping masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam yang merupakan sumber bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama dari para pemilik modal untuk menanamkan modalnya.

9) Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Dengan terbukanya akses pasar, maka akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya dibidang industri).

10) Insentif Perpajakan

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, maka diberikannya beberapa insentif dibidang perpajakan akan sangat membantu

menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansi biaya produksi yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal.

11) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Efektif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup:

- a) Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan arbitrase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya
- b) Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkn dalam sengketa tersebut
- c) Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar
- d) Netralitas dan profesionalisme hakim, arbitrase atau pihak ketiga yang diikutkan dalam proses pengambilan putusan.
- e) Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya.
- f) Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

- 1) Tingkat pengembalian yang diharapkan
 - a) Kondisi internal perusahaan

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada dibawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi.

b) Kondisi Eksternal Perusahaan

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.

2) Biaya investasi

Biaya investasi dapat di tentukan dari tingkat bunga pinjaman apabila semakin tinggi maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat berinvestasi semakin menurun. Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasinya tetap rendah.³⁷

b. Tujuan Investasi³⁸

1) Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut

³⁷Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 278-279.

³⁸Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

- 2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
- 3) Terciptanya kemakmuran bagi para investor atau pemegang saham
- 4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa

c. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang didasarkan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan, imam kepada Allah, dan bahwa dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia makhluk ciptaan-Nya karena makhluk Ilahiah yaitu makhluk sebaik-baik ciptaan, yang bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan menjadi kekasih Allah. Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.³⁹

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, atau dengan kata

³⁹Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 9.

lain berinvestasi yang terdapat dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. *Al-Baqarah*: 261).⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa investasi diperbolehkan dalam Islam, karena setiap manusia harus mempersiapkan masa depannya. Investasi yang dilakukan karena Allah akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat.

Ayat di atas menyarankan kepada manusia untuk berinfak yang dapat dilihat dari kata *matsal*. Bukankah jika ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak.⁴¹ Serupa halnya dengan investasi jika investor menanamkan modalnya di suatu perusahaan yang terbuka untuk investasi maka investor tersebut akan

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), hlm. 65.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 690.

memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. Investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *qiyaman* yaitu sarana pokok kehidupan. Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Donald R.M Hasibuan (skripsi di Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan 2007)	Analisis pengaruh PMDN dan PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara	PMDN (X1), PMA (X2), PAD (Y)	Dengan menggunakan uji “t” ditemukan hubungan bahwa PMDN signifikan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara sedangkan PMA tidak signifikan mempengaruhi

⁴²Indah Yuliana, *Op. Cit.*, hlm. 14-16.

				variabel Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95%.
2	Muhammad Farchan (skripsi di Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan 2003)	Pengaruh investasi PMDN dan PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota medan (1980-2002)	PMDN (X1), PMA (X2) PAD (Y)	Dengan menggunakan uji t dan uji F ditemukan bahwa pengaruh PMDN dan PMA terhadap PAD adalah signifikan.
3	Doni Julfiansyah (Jurnal di Universitas Mulawarman jalan gragot Gunung Kelua Samarinda 2013)	Pengaruh investasi penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri dan jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah kota Semarang	PMA/ PMDN (X1), jumlah penduduk (X2), Produk domestik regional bruto (Y1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y2)	Tingkat korelasi variabel PMA, PMDN, dan jumlah penduduk tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara simultan (keseluruhan) sebesar 96,1%. Kemudian koefisien determinasi sebesar 92,4% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (PMA, PMDN, Jumlah Penduduk) yang digunakan dapat menjelaskan model sebesar 92,4% terhadap PDRB sedangkan sisanya sebesar 7,6% adalah dari variabel

				independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
4	Muhammad Reza (Skripsi di Universitas Islam Indonesia 2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode (2009-2013)	Pengeluaran pemerintah (X1), PDRB (X2), jumlah penduduk (X3), investasi (PMDN) (X4), pendapatan asli daerah (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah
5	Anita Ika Novita, Suharno, Bambang Widarno (Jurnal di Universitas Slamet Riyadi Surakarta 2016)	Pengaruh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Kabupaten Sukoharjo	Investasi (X1), PDRB (X2), belanja modal (X3), pendapatan asli daerah (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sukoharjo. Berdasarkan uji F ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
6	Kartina Batik (jurnal 2013)	Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan	Investasi (X1), PDRB (X2), jumlah penduduk (X3), penerimaan pembangunan (X4), inflasi (X5), pendapatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli. Berdasarkan uji F

		Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat	asli daerah (Y).	variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu PAD.
7	Ifan Restu Bagus Pamungkas (Jurnal di Universitas Negeri Semarang 2013)	Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011.	PMDN (X1), PMA (X2), PDRB (X3), PAD (Y).	Secara statistik PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Secara statistik PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada penelitian Donald R.M. Hasibuan, berjudul analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan peneliti berjudul pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Persamaan penelitian peneliti dengan Donald R.M Hasibuan adalah sama-sama melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara, menggunakan variabel penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah, dan menggunakan analisis regresi berganda.

Pada penelitian Muhammad Farchan, perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016, sedangkan pada penelitian Muhammad Farchan melakukan penelitian di Kota

Medan tahun 1980-2002. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah. Sama-sama menggunakan analisis regresi berganda.

Pada penelitian Doni Julfiansyah, perbedaannya adalah variabel independennya adalah penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan jumlah penduduk. Variabel dependen PDRB dan pendapatan asli daerah. Sedangkan pada peneliti variabel independennya penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, variabel dependen pendapatan asli daerah. Pada Penelitian Doni Julfiansyah melakukan penelitian di Kota Semarang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis regresi berganda.

Pada penelitian Muhammad Reza, perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016, sedangkan pada penelitian Muhammad Reza melakukan penelitian di daerah Istimewah Yogyakarta periode 2009-2013. Penelitian Muhammad Reza menggunakan jenis data panel sedangkan peneliti menggunakan jenis data time series. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel terikat pendapatan asli daerah.

Pada penelitian Anita Ika Novita, dkk. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Sukaharjo, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu Investasi, PDRB, belanja modal,

sedangkan peneliti menggunakan variabel investasi (penanaman modal dalam negeri (X1), penanaman modal asing (X2). Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan analisis berganda.

Pada penelitian Kartika Batik, perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti Kartika Batik melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Barat, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian terdahulu memiliki variabel bebas yaitu investasi, PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, inflasi, sedangkan peneliti hanya menggunakan variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan analisis berganda.

Pada penelitian Ifan Restu Bagus Pamungkas, perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel bebas yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, dan PDRB. Peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Pati tahun 1982-2011. Persamaannya adalah peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah dan menggunakan analisis regresi berganda.

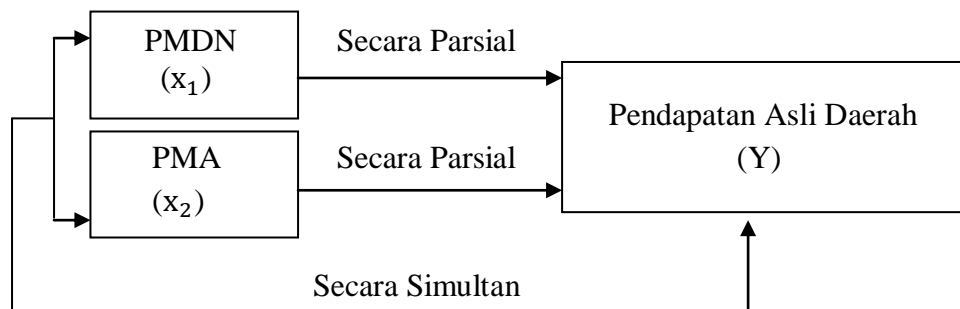
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Di dalam kerangka pikir akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan dan menunjuk perspektif terhadap masalah penelitian.

Penelitian adalah berjudul Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016. Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Kehadiran penanaman modal dapat membantu pemerintah dalam pemecahan masalah lapangan pekerjaan baru karena dalam kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan tenaga kerja bagi penanaman modal khususnya penanaman modal asing sangat dibatasi yakni tenaga kerja asing hanya diperbolehkan sepanjang tenaga kerja di Indonesia yang tersedia untuk bidang-bidang tertentu belum tersedia.

Keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal adalah adanya modal baru yang diperoleh dari penanaman modal sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan di daerah, berdirinya perusahaan baru akan menambah pemasukan pajak bagi negara dan dapat mengatasi masalah pengangguran pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{01} = Tidak terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

H_{a1} = Terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

H_{02} = Tidak terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

H_{a2} = Terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

H_{03} = Tidak terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

H_{a3} = Terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti menggunakan wilayah tersebut karena Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi ke empat yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dan sudah dipercayai sebagai salah satu Provinsi yang bisa menjalankan otonomi daerah.¹ Data peneliti diperoleh melalui *website www.bps.go.id*. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.²

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

41. ¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, (Medan: BPS, 2015), hlm.

²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38.

kesimpulan.³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1980 hingga 2017.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 30 sampel. Alasan peneliti menetapkan sampel sebanyak 30 sampel karena data yang dipublikasikan dari badan pusat statistik hanya mencapai 30 tahun dari populasi peneliti, masih terdapatnya data yang tidak dipublikasikan ataupun masih ditemukannya data yang bolong-bolong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kriteria khusus terhadap sampel.⁴

Kriteria dalam pengumpulan sampel yaitu tersedia laporan Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik Sumatera Utara *website* resmi *www.bps.go.id* tahun 1987-2016. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 sampel.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 80.

⁴Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: data sekunder internal dan eksternal. Data sekunder internal ada yang tersedia dalam format siap pakai maupun dalam bentuk yang masih harus diolah lebih lanjut. Data sekunder eksternal adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh sumber-sumber di luar organisasi, diantaranya berupa publikasi pemerintah (misalnya laporan dari BPS, departemen perindustrian dan perdagangan, departemen keuangan, Bank Indonesia), buku dan majalah, internet dan data komersial (data yang dijual oleh agen atau lembaga penelitian swasta). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder eksternal yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1987-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.⁵ Data sekunder mudah didapatkan dan tersebar luas diberbagai sumber, yaitu data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tersedia secara lengkap.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data *time series* (runtun waktu) dari tahun 1987 sampai tahun 2016. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh yaitu:

⁵Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Statistik I* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 33.

⁶Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 8.

1. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan ini adalah sekunder. Data sekunder ialah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan berbagai pihak baik pihak pengumpul data atau pihak lain. Data penelitian ini diperoleh dari data badan pusat statistik melalui *www.bps.go.id*.

2. Studi Kepustakaan

Uraian yang berisi tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan praktik yang bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku tentang ekonomi yang terkait dengan variabel penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu dilakukan teknis analisis data. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program *Eviews 9.0*.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data statistik deskriptif dapat melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentasi.⁷

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat ditempuh dengan uji *Jarque Bera*. Apabila nilai *P-value* > tingkat signifikan (5 persen) maka residual terdistribusi normal.⁸

3. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan kurang dari 5 persen.⁹

4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis terlebih dahulu akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan antara lain:

a. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji

⁷Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.147-148.

⁸Shochrul R. Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 43.

⁹Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 179.

multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $VIF > 10$. Jika nilai $VIF < 10$ artinya tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas, maka dilakukan uji *White Heteroskedastisitas*. Jika nilai *p-value Obs*R-Squared* lebih besar dari α , maka H_0 diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁰

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Untuk menguji autokorelasi biasanya dipakai uji *Durbin Watson* (DW). Dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Terjadi autokorelasi jika $4-dw < d_l$
- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika $4-dw > d_u$

¹⁰Shochrul R. Ajija, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 39.

5. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda merupakan model regresi yang terdiri dari lebih satu variabel independen. Regresi dapat dikatakan linier berganda jika variabel terikatnya dijelaskan lebih dari satu variabel bebas.¹¹ Model untuk regresi berganda pada umumnya dapat ditulis melalui persamaan berikut.¹²

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 \text{PMDN} + \beta_2 \text{PMA} + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

β_0 = Konstanta

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

PMA = Penanaman Modal Asing

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

e = Koefisien Pengganggu

6. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka berarti bahwa variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan dengan baik variabel

¹¹Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 269.

¹²Shochrul R. Ajija, *dkk. Op. Cit.*, hlm. 31.

dependen.¹³ Adjusted R Squared biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Adjusted R Squared berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien determinasi karena peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* < α maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya apabila *p-value* > α maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . jika *p-value* < α maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebaliknya jika *p-value* > α maka H_0 diterima

¹³*Ibid.*, hlm. 34.

artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Di zaman pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van Sumatera*, yang meliputi Sumatera, dikepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan keresidenan.¹

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang gubernur dan terdiri dari daerah-daerah administratif keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan keresidenan Tapanuli.²

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera

81. ¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2012* (Medan: BPS, 2012), hlm.

²*Ibid.*, hlm. 81.

dibagi menjadi tiga Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.³

Pada awal tahun 1949, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Perubahan demikian ini ditetapkan dengan keputusan pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I, yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara dan perubahan peraturan pembentukan provinsi sumatera utara.⁴

2. Kondisi Geografis di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Letak Provinsi ini sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan

³*Ibid.*, hlm. 81.

⁴*Ibid.*, hlm. 82.

internasional dan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta diapit oleh tiga Provinsi dengan batas-batas sebagai berikut:⁵

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh
- b. Di sebelah Timur dengan Negara Malaysia diselat Malaka
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- d. Dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Sumatera Utara dibagi menjadi tiga kelompok wilayah/ kawasan dilihat dari kondisi letak dan kondisi alam yaitu kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan Dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir dan Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat,

⁵Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2016* (Medan: BPS, 2016), hlm. 5.

Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.⁶

Luas Daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di Daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-Pulau Batu, serta beberapa Pulau Kecil, baik dibagian Barat maupun bagian Timur Pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Luas Daerah Menurut Kabupaten/ Kota
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 (km²)

Kabupaten/ kota	Luas Daerah
Kabupaten Langkat	6.262,00
Kabupaten Mandailing Natal	6.134,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	6.030,47
Kota Tebing Tinggi	31,00

Berdasarkan tabel IV.1 di atas terlihat bahwa luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km², di ikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km², kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km². Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² dari total luas Sumatera Utara.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 5-6.

⁷*Ibid.*, hlm. 7.

3. Kondisi Demografi di Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh penduduk dari berbagai suku seperti Melayu, Batak, Nias, Aceh, Minangkabau, Jawa, dan berbagai suku lainnya.⁸ Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 (Jiwa)

Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
7.037.326	7.065.585	14.102.911	99,60

Berdasarkan tabel IV.2 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 (jiwa) penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.102.911 jiwa,⁹ yang terdiri dari 7.037.326 jiwa penduduk laki-laki dan 7.065.585 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin *sex ratio* sebesar 99,60 artinya untuk tiap 100 penduduk perempuan ada 99,60 penduduk laki-laki. *Sex ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu

⁸Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, Op., Cit., hlm. 41.

⁹Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2017* (Medan: BPS, 2017), hlm.

tertentu. Penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan adalah 7.335.587 jiwa dan yang tinggal di daerah pedesaan adalah 6.767.324 jiwa.¹⁰

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Faktor-faktor otonomi yang diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

- a. Keragaman bangsa yang dimiliki Indonesia
- b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat yang dimiliki di setiap wilayah.
- c. Desa dan persekutuan hukum merupakan sendi yang harus dipertahankan dalam susunan pemerintah negara.
- d. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis.
- e. Desentralisasi salah satu cara untuk mewujudkan tatanan demokratis.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 64-65.

f. Efisiensi dan efektifitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi.

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan daerah dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Dengan demikian peran serta rasa tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya, serta memelihara hasil-hasil pembangunan akan semakin meningkat, serta dapat memicu daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerahnya melalui inovasi dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara merupakan pendapatan murni dari daerah yang secara bebas dapat dipergunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Setiap tahun pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara diwarnai dengan berbagai perkembangan berdasarkan berbagai indikator ekonomi. Perkembangan ini dapat dilihat dari hasil-hasil peningkatan yang diperoleh daerah pada tiap tahunnya. Pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1987	56,72366
1988	72,11554
1989	80,69195

1990	90,57194
1991	97,088977
1992	114,283531
1993	131,478085
1994	153,348905
1995	156,514662
1996	187,738013
1997	255,07848
1998	396,469281
1999	437,075216
2000	2.555,1
2001	423,1
2002	614,4
2003	908,3
2004	1.143,1
2005	1.018,0
2006	1.368,2
2007	1.503,0
2008	2.181,3
2009	2.016,07
2010	2.226,50
2011	3.181,89
2012	4.052,10
2013	4.809,37
2014	4.944,50
2015	5.257,67
2016	4.630

Sumber: BPS diolah

Berdasarkan tabel IV.3 terlihat bahwa pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar 423,1 milyar yang dapat disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak dan retribusi yang diperoleh daerah dikarenakan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. Kemudian pada tahun berikutnya perekonomian daerah berusaha bangkit dengan perbaikan berbagai indikator ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi daerah.

Yang ditandai dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun dimana pendapatan asli daerah tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.257,67 milyar.

2. Penanaman Modal Di Provinsi Sumatera Utara

Pada era otonomi daerah persoalan penanaman modal perlu dikaji karena untuk memperbaiki perekonomian adalah dengan meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen. Oleh karena itu, penanaman modal memegang peranan penting dalam perekonomian baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Untuk melihat realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman
Modal Asing (PMA) Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 1987-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri	Penanaman Modal Asing
1987	1.865,105	10,63
1988	2.516,924	105,12
1989	1.712,475	12,94
1990	19.608,48	1.118,95
1991	19.437,04	97,93
1992	16.857	266,59
1993	16.567,83	117,51

1994	18.743	44,56
1995	19.051,38	1.547,9
1996	20.274,64	143,04
1997	21.869,38	285,54
1998	15.986,95	655,39
1999	7.688,736	423,28
2000	9.270,61	668,43
2001	11.066,02	422,21
2002	10.926,13	186,18
2003	13.163,61	699,03
2004	142,4871	935,43
2005	7.331,394	1.061,03
2006	0,0516	5.466,31
2007	1.672,463	2.325,23
2008	391,3337	811,33
2009	2.644,965	85.830,62
2010	817,9234	102.278,1
2011	5.756,386	86.026,72
2012	23,70167	211.138,1
2013	2.565,871	836.513,4
2014	5.231,906	682.815,2
2015	4.287,417	1.717,993
2016	4.954,829	1.438.865

Sumber: BPS diolah

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Penyebab penanaman modal mengalami fluktuasi dapat disebabkan karena ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan ditingkat pusat dan daerah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air, dan lain-lain, ketidakstabilan mata uang atau nilai tukar rupiah.

C. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik melalui situs *www.bps.go.id*. Berdasarkan laporan tersebut peneliti menggunakan periode selama 30 tahun yaitu dari tahun 1987 sampai dengan 2016. Untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maximum, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.5
Statistik Deskriptif

	Pendapatan Asli Daerah	Penanaman Modal Dalam Negeri	Penanaman Modal Asing
Mean	1502.059	8747.534	172628.8
Median	761.3500	6543.890	755.1800
Maximum	5257.670	21869.38	1717993.
Minimum	56.72366	0.051600	10.63000
Std. Dev.	1704.355	7501.413	430062.3
Observations	30	30	30

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata sebesar 1502.059 milyar semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin sejahtera masyarakatnya. Jumlah pendapatan asli daerah terendah sebesar 56.72366 milyar dan tertinggi sebesar 5257.670 milyar dengan standar deviasi sebesar 1704.355 milyar. Pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan Provinsi Sumatera Utara menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah.

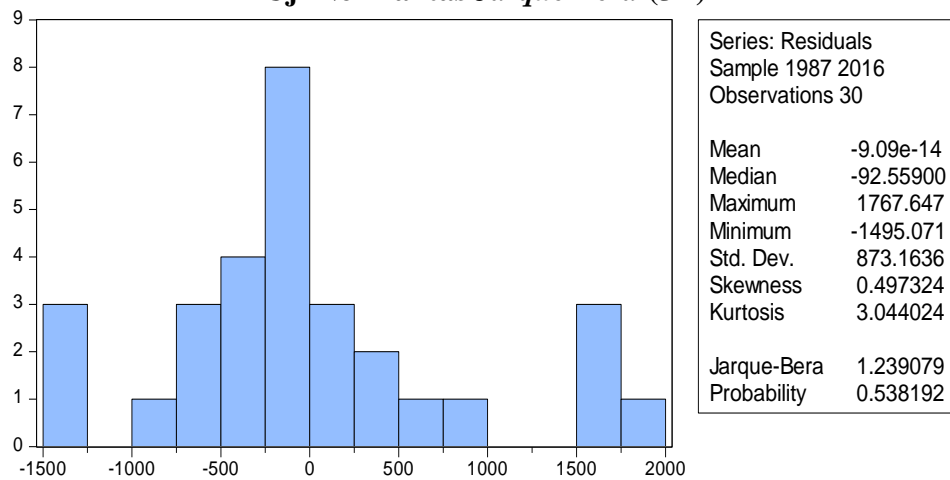
Penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata sebesar 8747.534 milyar dengan jumlah terendah sebesar 0.051600 milyar dan penanaman modal dalam negeri tertinggi sebesar 21869.38 milyar dan standar deviasi variabel sebesar 7501.413 milyar.

Penanaman modal asing memiliki rata-rata sebesar 172628.8 milyar dengan jumlah terendah sebesar 10.63000 milyar dan jumlah tertinggi sebesar 1717993 milyar. Penanaman modal asing memiliki standar deviasi sebesar 430062.3 milyar.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya data tersebut perlu diuji kenormalan distribusinya. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan menggunakan *Jarque Bera* adalah dengan melihat angka probabilitas dengan menggunakan $\alpha = 5$ persen, apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Jarque Bera* dapat dilihat pada Grafik IV.1 sebagai berikut:

Grafik IV.1
Uji Normalitas Jarque Bera (JB)



Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan grafik IV.1 di atas, diketahui bahwa nilai probabiliti *Jarque Bera* sebesar 0,538192. Jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikan 5 persen maka $0,538192 > 0,05$. Dengan demikian data penelitian ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Y), Penanaman Modal Dalam Negeri (X1), Penanaman Modal Asing (X2) berdistribusi normal.

3. Uji Linieritas

Tabel IV.6
Uji Linieritas

Ramsey RESET Test			
Equation: LINIER			
Specification: PAD C PMDN PMA			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	df	Probability
t-statistic	3.855160	26	0.0007
F-statistic	14.86226	(1, 26)	0.0007
Likelihood ratio	13.56331	1	0.0002

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.6 di atas uji linieritas dapat diketahui dari nilai *p-value* sebesar 0,0007 karena signifikan $< 0,05$ maka dapat dinyatakan antara variabel penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah terdapat hubungan linier.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji ini menggunakan regresi linier berganda untuk mencari apakah penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Perlu dilakukan pengujian dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 01/03/18 Time: 13:10			
Sample: 1987 2016			
Included observations: 30			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	80627.37	2.953781	NA
PMDN	0.000538	2.578683	1.071450
PMA	1.64E-07	1.250041	1.071450

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.7 di atas diketahui nilai VIF dari penanaman modal dalam negeri sebesar 1.071450, dan penanaman modal asing sebesar 1,071450. Kedua variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian data penelitian ini yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat nilai *p-value Obs*R-squared*. Apabila nilai *p-value Obs*R-squared* lebih besar dari tingkat signifikan 5 persen maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *White Heteroskedastisitas Test* dapat dilihat pada tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji White Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.206441	Prob. F(5,24)	0.0870
Obs*R-squared	9.447483	Prob. Chi-Square(5)	0.0925
Scaled explained SS	7.820906	Prob. Chi-Square(5)	0.1664

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.8 di atas, diketahui bahwa nilai prob. Obs*R-squared (Y) sebesar 0,0925. Jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikan 5 persen maka 0,0925 lebih besar 0,05. Dengan demikian penanaman modal dalam negeri (X1), penanaman modal asing (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

c. Uji Autokorelasi

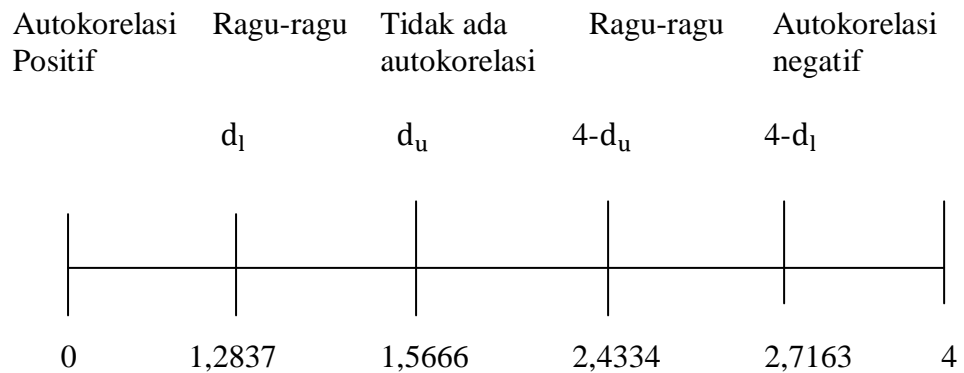
Autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota rangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan metode *Durbin Watson*. Syarat autokorelasi yakni jika statistik DW bernilai 2 (mendekati), maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.737535	Mean dependent var	1502.059
Adjusted R-squared	0.718093	S.D. dependent var	1704.355
S.E. of regression	904.9253	Akaike info criterion	16.54822
Sum squared resid	22110024	Schwarz criterion	16.68834
Log likelihood	-245.2233	Hannan-Quinn criter.	16.59305
F-statistic	37.93548	Durbin-Watson stat	1.053447
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil data, diolah

Gambar IV.1
Uji Durbin Watson



Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,053447. Sehingga hipotesis yang diterima yakni $4-dw > d_u$, maka H_0 diterima sehingga tidak terjadi autokorelasi.

5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri (X1), penanaman modal asing (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Provinsi Sumatera Utara. Hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel IV.10 sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 01/03/18 Time: 09:47				
Sample: 1987 2016				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1696.020	283.9496	5.972960	0.0000
PMDN	-0.077344	0.023188	-3.335565	0.0025
PMA	0.002796	0.000404	6.912147	0.0000
R-squared	0.737535	Mean dependent var		1502.059
Adjusted R-squared	0.718093	S.D. dependent var		1704.355
S.E. of regression	904.9253	Akaike info criterion		16.54822
Sum squared resid	22110024	Schwarz criterion		16.68834
Log likelihood	-245.2233	Hannan-Quinn criter.		16.59305
F-statistic	37.93548	Durbin-Watson stat		1.053447
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel IV.10 di atas, maka persamaan analisis regresi linier berganda penelitian ini adalah:

$$PAD = 1696,020 + (0,077344) PMDN + 0,002796 PMA$$

Persamaan hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 1696,020 artinya apabila penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing bernilai 0, maka pendapatan asli daerah sebesar 1696,020 milyar.
- b. Nilai koefisien regresi pada penanaman modal dalam negeri sebesar -0,077344, artinya jika penanaman modal dalam negeri bertambah 1 milyar sedangkan penanaman modal asing tetap maka pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,077344 milyar. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negatif

antara penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah. Hubungan negatif adalah jika peningkatan nilai pada suatu variabel akan diikuti oleh penurunan nilai pada variabel lain.

- c. Nilai koefisien regresi pada penanaman modal asing sebesar 0,002796, artinya jika penanaman modal asing bertambah 1 milyar sedangkan penanaman modal dalam negeri tetap maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,002796 milyar. Koefisien bernilai positif artinya adanya hubungan yang positif antara penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah. Hubungan positif adalah jika peningkatan atau penurunan nilai pada suatu variabel diikuti pula dengan peningkatan atau penurunan nilai pada variabel yang lain.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel IV.11 sebagai berikut:

Tabel IV.10
Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.737535
Adjusted R-squared	0.718093
S.E. of regression	904.9253
Sum squared resid	22110024
Log likelihood	-245.2233
F-statistic	37.93548
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.11 di atas, nilai R-squared diperoleh sebesar 0,737535. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mampu menjelaskan variasi pendapatan asli daerah sebesar 73,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 26,25 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti produk domestik regional bruto dengan meningkatnya produk regional bruto akan dapat menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan belanja modal karena apabila belanja modal digunakan secara efektif dan efisien maka pembangunan di suatu daerah juga akan terlaksana dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat dengan bukti nyata bahwa retribusi atau pajak yang mereka bayarkan sudah dialokasikan untuk program pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pembayaran pajak untuk kemajuan daerah sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah..

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* < α maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebaliknya apabila *p-value* > α maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV. 12 sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1696.020	283.9496	5.972960	0.0000
PMDN	-0.077344	0.023188	-3.335565	0.0025
PMA	0.002796	0.000404	6.912147	0.0000

Sumber: Hasil data, diolah

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV.12 di atas, apabila nilai prob. t-statistik < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai prob. t statistik > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Berikut merupakan hasil uji t dari masing-masing variabel bebas:

1) Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan tabel IV.12 diketahui nilai prob. t-statistik dari penanaman modal dalam negeri sebesar $0.0025 < 0,05$. Hasil ini berarti bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

2) Penanaman Modal Asing

Berdasarkan tabel IV.12 diketahui nilai prob. t-statistik dari penanaman modal asing sebesar $0,0000 < 0,05$. Hasil ini berarti bahwa penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebaliknya jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel IV.13 sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji F

F-statistic	37.93548
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil data, diolah

Berdasarkan tabel IV.13 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian data diperoleh nilai prob. F-statistik yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, semua variabel independen yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (X1), Penanaman Modal Asing (X2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1987-2016. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Eviews* versi 9. Berdasarkan uji normalitas nilai probabiliti penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara lebih besar dari 0,05 ($0,538192 > 0,05$), artinya data berdistribusi normal dengan uji *Jarque Bera*.

Untuk uji linieritas tingkat signifikan 0,05 ($0,0007 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara terdapat hubungan linier. Model regresi ini juga lulus dalam uji asumsi klasik. Berdasarkan uji multikolinearitas di Provinsi Sumatera Utara nilai VIF < 10 dimana penanaman modal dalam negeri sebesar 1,071450, dan penanaman modal asing sebesar 1,071450. Artinya tidak terdapat multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas di Provinsi Sumatera Utara diketahui nilai signifikan 5

persen ($0,0925 > 0,05$). Diketahui bahwa penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing tidak terkena heteroskedastisitas. Berdasarkan uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,053447. Artinya tidak terjadi autokorelasi karena $4-dw > du$ ($2,946553 > 1,5666$).

Untuk hasil uji analisis regresi berganda Nilai koefisien regresi pada penanaman modal dalam negeri sebesar $-0,077344$, artinya jika penanaman modal dalam negeri bertambah 1 milyar sedangkan penanaman modal asing tetap maka pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar $0,077344$ milyar. Nilai koefisien regresi pada penanaman modal asing sebesar $0,002796$, artinya jika penanaman modal asing bertambah 1 milyar sedangkan penanaman modal dalam negeri tetap maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar $0,002796$ milyar. Berdasarkan uji regresi berganda Penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk hasil uji koefisien determinasi R-squared diperoleh sebesar $0,737535$. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mampu menjelaskan variasi pendapatan asli daerah sebesar $73,75$ persen. Sedangkan sisanya sebesar $26,25$ persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

Untuk hasil uji t menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri sebesar $0,0025 < 0,05$ dan penanaman modal asing sebesar $0,0000 < 0,05$.

Artinya penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uji F tingkat signifikan 0,05 yang dibandingkan dengan nilai prob. F-statistik ($0,000000 < 0,05$). Artinya penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Perhitungan statistik dengan menggunakan *Eviews* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menerangkan variasi pendapatan asli daerah. Selanjutnya hasil dari interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi penanaman modal dalam negeri menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien sebesar $-0,077344$. Hal ini berarti penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dimana ketika penanaman modal dalam negeri mengalami kenaikan 1 milyar maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar $0,077344$ milyar dengan asumsi penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, penanaman modal dalam negeri tidak dapat menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Sadono Sukirno yang menyatakan bahwa investasi meliputi hal-hal sebagai berikut: seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan perbelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal, dan penambahan dalam nilai stok-stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi (kalau nilai stok barang dalam perusahaan-perusahaan berkurang, maka ia merupakan investasi negatif). Ketiga nilai investasi tersebut dinamakan investasi *agregat bruto*.

Dalam tiap-tiap perekonomian pada waktu yang bersamaan dengan dilakukannya pembentukan modal baru, akan terjadi pula penyusutan-penyusutan atas barang-barang modal yang sudah lama digunakan.¹¹ Pendapatan asli daerah tidak akan meningkat apabila seluruh jumlah investasi yang dilakukan belum dikurangi dengan susutan nilai dari alat-alat modal yang berlaku dalam tahun tersebut. Karena investasi tersebut tidak akan sama besarnya dengan penambahan yang ditimbulkan oleh investasi baru yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Reza dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode (Tahun 2009-2013)”. Dalam penelitian ini memiliki variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah

¹¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Malaysia: Bina Grafika, 1981), hlm. 117.

penduduk dan investasi (penanaman modal dalam negeri). Dalam penelitian ini penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikan 5 persen, variabel penanaman modal dalam negeri memiliki nilai prob.t-statistik sebesar $0,0025 < 0,05$. Hal ini berarti penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya penanaman modal dalam negeri akan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Said Sa'ad Marthon yang menyatakan bahwa investasi yang dilakukan bisa diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Meningkatnya Investasi khususnya penanaman modal dalam negeri akan memberikan dampak terhadap sektor produksi, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Donald R.M Hasibuan dengan judul "Analisis Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara". Dalam penelitian ini dengan menggunakan uji t variabel penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien penanaman modal asing sebesar 0,002796. Hal ini berarti penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dimana ketika penanaman modal asing mengalami kenaikan 1 milyar maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,002796 milyar dengan asumsi penanaman modal dalam negeri tetap. Dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5 persen, variabel penanaman modal asing memiliki nilai prob. t-statistik sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Hendry Faizal Noor yang menyatakan bahwa peningkatan investasi akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan ditengah masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dan akan meningkatkan pendapatan asli masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifan Restu Bagus Pamungkas dengan judul “Analisis Pengaruh PMDN, PMA dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011”. Dalam penelitian ini dengan menggunakan uji regresi penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Farchan yang berjudul “Pengaruh Investasi PMDN dan PMA Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan (1980-2002)”. Dalam penelitian ini dengan menggunakan uji t variabel penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, ketika penanaman modal asing meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya penanaman modal asing maka akan terbuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Adanya penanaman modal asing berdampak terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, serta usaha-usaha di berbagai sektor. Dengan berjalannya kegiatan ekonomi tersebut secara langsung berdampak meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat bersedia untuk membayar pajak dan retribusi.

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikan 5 persen dengan prob. F statistik sebesar 0,000000. Hasil analisis data uji F menunjukkan bahwa $p\text{-value} < \alpha$ ($0,000000 < 0,005$), maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan secara simultan variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti karlina batik yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu investasi, PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pembangunan dan inflasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu PAD.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Donald R.M Hasibuan yang berjudul “Analisis Pengaruh PMDN Dan PMA Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi investasi dari suatu daerah maka semakin besar pajak yang diperoleh, dengan semakin besar pajak maka semakin mampu daerah tersebut untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan peneliti dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

Di antara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian.
2. Keterbatasan dana peneliti dalam penyempurnaan dari hasil penelitian ini.
3. Keterbatasan wawasan peneliti

Walaupun demikian, peneliti berusaha sudah mengupayakan agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa dapat disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016” dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan adalah 0,737535 atau sama dengan 73,75 persen. Berarti 73,75 persen variabel penanaman modal dalam negeri (X1) dan penanaman modal asing (X2) secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y). sementara 26,24 persen harus dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi yang diteliti.
2. Berdasarkan uji t variabel penanaman modal dalam negeri terdapat pengaruh signifikan antara penanaman modal dalam negeri (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai signifikan 5 persen. Jika $p\text{-value} < \alpha$ ($0,0025 < 0,05$), maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara penanaman modal dalam negeri terhadap pendapatan asli daerah.
3. Berdasarkan uji t variabel penanaman modal asing terdapat pengaruh signifikan antara penanaman modal asing (X2) terhadap pendapatan asli

daerah (Y). Dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai signifikan 5 persen. Jika $p\text{-value} < \alpha$ ($0,0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah.

4. Berdasarkan uji F dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dapat dilihat dari hasil perhitungan uji F dengan nilai signifikan 5 persen. Jika $p\text{-value} < \alpha$ ($0,000000 < 0,05$), H_0 ditolak. Artinya penanaman modal dalam negeri (X1), penanaman modal asing (X2) secara simultan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y) di Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang demi pencapaian manfaat yang optimal dan pengembangan dari hasil penelitian ini. Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016“ agar lebih digali lagi bagaimana pengaruh penanaman modal terhadap pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat

menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar lebih memperhatikan penanaman modal dalam kebijakan pembangunan karena kemampuannya dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk dunia akademik sebagai bahan untuk memperluas pemahaman dan wawasan terhadap teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- BadanPusatStatistik, *Sumatera Utara DalamAngka 2012*, Medan: BPS, 2012.
- _____ , *Sumatera Utara DalamAngka 2015*, Medan: BPS, 2015.
- _____ , *Sumatera Utara DalamAngka 2016*, Medan: BPS, 2016.
- _____ , *Sumatera Utara DalamAngka 2017*, Medan: BPS, 2017.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* , Yogyakarta: Total Media, 2009.
- H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Padang: Akademia Permata, 2013.
- Ida Bagus Rahmadani Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indoneaia, 2006.
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Statistik I*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi 2008*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Malaysia: Bina Grafika, 1981.
- Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Sihombing, Jonker, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

- Shochrul R. Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Fitri Ani Siregar
2. Nama Panggilan : Fitri
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Padangmatinggi/ 21 Februari 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) Bersaudara
7. Alamat : Perumnas Pijorkoling
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 082165739297
10. Email : Siregarfitriani@Yahoo.Com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah : Alm. Imran Siregar
2. Pekerjaan : -
3. Ibu : Irma Wati Batubara
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Perumnas Pijorkoling

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200515 Padangsidimpuan (2003-2008)
2. MTs Negeri 2 Padangsidimpuan (2008-2011)
3. SMK Negeri 4 Padangsidimpuan (2011-2014)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2014-2018)

IV. PRESTASI AKADEMIK

- IPK : 3.77
- Karya Tulis Ilmiah : Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : B- 71 /In.14/G.6a/PP.00.9/03/2018

5 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan Kesediaan Menjadi
Pembimbing Skripsi*

Yth Bapak:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

2. Aliman Syahuri Zein, MEI

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : FITRI ANI SIREGAR

Nim : 1440200012

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakulta : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Lama : **Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara.**

Judul Baru : **Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016.**


Untuk itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

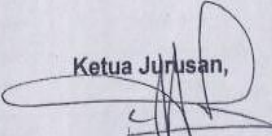
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:

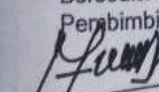
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

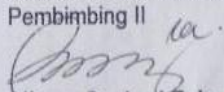
Ketua Jurusan,


Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II


Aliman Syahuri Zein, MEI

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-159/ln.14/G.6a/PP.00.9/05/2017
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Kesediaan Menjadi
Pembimbing Skripsi*

Padangsidimpuan, 16 Mei 2017

Yth Bapak:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Aliman Syahuri Zein, MEI

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : FITRI ANI SIREGAR
Nim : 14402 00012
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penanaman Modal Da'iam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Mengetahui:

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan,
[Signature]
Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia / Tidak-Bersedia
Pembimbing I

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Bersedia / Tidak-Bersedia
Pembimbing II

[Signature]
Aliman Syahuri Zein, MEI

Lampiran 1

**DATA PUSAT STATISTIK (BPS)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1987-2016
(DALAM MILYAR RUPIAH)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1987	56,72366
1988	72,11554
1989	80,69195
1990	90,57194
1991	97,088977
1992	114,283531
1993	131,478085
1994	153,348905
1995	156,514662
1996	187,738013
1997	255,07848
1998	396,469281
1999	437,075216
2000	2.555,1
2001	423,1
2002	614,4
2003	908,3
2004	1.143,1
2005	1.018,0
2006	1.368,2
2007	1.503,0
2008	2.181,3
2009	2.016,07
2010	2.226,50
2011	3.181,89
2012	4.052,10
2013	4.809,37
2014	4.944,50
2015	5.257,67
2016	4.630

Sumber: Badan Pusat Statistik

DATA SEKUNDER
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1987-2016
(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri
1987	1.865,105
1988	2.516,924
1989	1.712,475
1990	19.608,48
1991	19.437,04
1992	16.857
1993	16.567,83
1994	18.743
1995	19.051,38
1996	20.274,64
1997	21.869,38
1998	15.986,95
1999	7.688,736
2000	9.270,61
2001	11.066,02
2002	10.926,13
2003	13.163,61
2004	142,4871
2005	7.331,394
2006	0,0516
2007	1.672,463
2008	391,3337
2009	2.644,965
2010	817,9234
2011	5.756,386
2012	23,70167
2013	2.565,871
2014	5.231,906
2015	4.287,417
2016	4.954,829

Sumber: Badan Pusat Statistik

DATA SEKUNDER
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 1987-2016
(DALAM MILYAR RUPIAH)

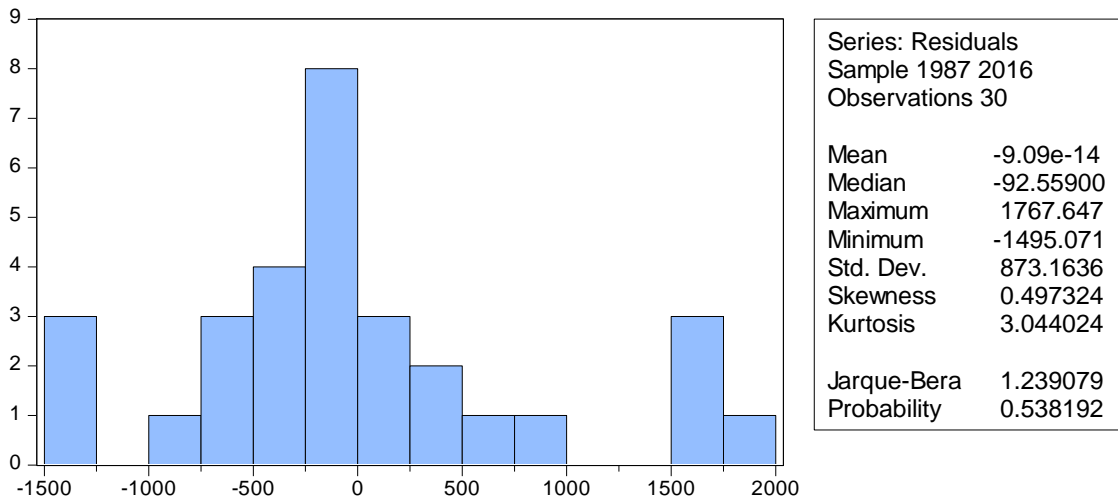
Tahun	Penanaman Modal Asing
1987	10,63
1988	105,12
1989	12,94
1990	1.118,95
1991	97,93
1992	266,59
1993	117,51
1994	44,56
1995	1.547,9
1996	143,04
1997	285,54
1998	655,39
1999	423,28
2000	668,43
2001	422,21
2002	186,18
2003	699,03
2004	935,43
2005	1.061,03
2006	5.466,31
2007	2.325,23
2008	811,33
2009	85.830,62
2010	102.278,1
2011	86.026,72
2012	211.138,1
2013	836.513,4
2014	682.815,2
2015	1.717.993
2016	1.438.865

Sumber: Badan Pusat Statistik

HASIL OUTPUT EIEWS**STATISTIK DESKRIPTIF**

	PAD	PMDN	PMA
Mean	1502.059	8747.534	172628.8
Median	761.3500	6543.890	755.1800
Maximum	5257.670	21869.38	1717993.
Minimum	56.72366	0.051600	10.63000
Std. Dev.	1704.355	7501.413	430062.3
Skewness	1.064261	0.405673	2.660107
Kurtosis	2.754022	1.634906	8.921483
Jarque-Bera	5.738885	3.152207	79.21078
Probability	0.056731	0.206779	0.000000
Sum	45061.78	262426.0	5178865.
Sum Sq. Dev.	84239980	1.63E+09	5.36E+12
Observations	30	30	30

UJI NORMALITAS JARQUE BERA (JB)



UJI LINIERITAS

Ramsey RESET Test			
Equation: UNTITLED			
Specification: PAD C PMDN PMA			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	df	Probability
t-statistic	3.855160	26	0.0007
F-statistic	14.86226	(1, 26)	0.0007
Likelihood ratio	13.56331	1	0.0002
F-test summary:			
	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	8041770.	1	8041770.
Restricted SSR	22110024	27	818889.8

Unrestricted SSR	14068254	26	541086.7	
LR test summary:				
	Value	df		
Restricted LogL	-245.2233	27		
Unrestricted LogL	-238.4417	26		
Unrestricted Test Equation:				
Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 01/16/18 Time: 22:00				
Sample: 1987 2016				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2511.381	313.0603	8.022036	0.0000
PMDN	-0.121474	0.022052	-5.508468	0.0000
PMA	0.010811	0.002105	5.135946	0.0000
FITTED^2	-0.000419	0.000109	-3.855160	0.0007
R-squared	0.832998	Mean dependent var		1502.059
Adjusted R-squared	0.813728	S.D. dependent var		1704.355
S.E. of regression	735.5859	Akaike info criterion		16.16278
Sum squared resid	14068254	Schwarz criterion		16.34960
Log likelihood	-238.4417	Hannan-Quinn criter.		16.22255
F-statistic	43.22889	Durbin-Watson stat		1.383321

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

UJI MULTIKOLINEARITAS

Variance Inflation Factors			
Date: 01/16/18 Time: 21:58			
Sample: 1987 2016			
Included observations: 30			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	80627.37	2.953781	NA
PMDN	0.000538	2.578683	1.071450
PMA	1.64E-07	1.250041	1.071450

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.206441	Prob. F(5,24)	0.0870
Obs*R-squared	9.447483	Prob. Chi-Square(5)	0.0925
Scaled explained SS	7.820906	Prob. Chi-Square(5)	0.1664
Test Equation:			
Dependent Variable: RESID^2			
Method: Least Squares			

Date: 01/16/18 Time: 22:03

Sample: 1987 2016

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	973433.2	400873.2	2.428282	0.0230
PMDN^2	-0.002974	0.005016	-0.592853	0.5588
PMDN*PMA	0.000265	0.000521	0.508444	0.6158
PMDN	6.015347	105.8653	0.056821	0.9552
PMA^2	-2.16E-06	1.17E-06	-1.848737	0.0769
PMA	2.103285	2.470156	0.851479	0.4029
R-squared	0.314916	Mean dependent var		737000.8
Adjusted R-squared	0.172190	S.D. dependent var		1071698.
S.E. of regression	975074.6	Akaike info criterion		30.59527
Sum squared resid	2.28E+13	Schwarz criterion		30.87551
Log likelihood	-452.9291	Hannan-Quinn criter.		30.68492
F-statistic	2.206441	Durbin-Watson stat		1.367728
Prob(F-statistic)	0.086953			

UJI AUTOKORELASI, ANALISIS REGRESI BERGANDA, DAN UJI HIPOTESIS

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 01/03/18 Time: 09:40				
Sample: 1987 2016				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1696.020	283.9496	5.972960	0.0000
PMDN	-0.077344	0.023188	-3.335565	0.0025
PMA	0.002796	0.000404	6.912147	0.0000
R-squared	0.737535	Mean dependent var		1502.059
Adjusted R-squared	0.718093	S.D. dependent var		1704.355
S.E. of regression	904.9253	Akaike info criterion		16.54822
Sum squared resid	22110024	Schwarz criterion		16.68834
Log likelihood	-245.2233	Hannan-Quinn criter.		16.59305
F-statistic	37.93548	Durbin-Watson stat		1.053447
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		dL
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	
6	0.6102	1.4002					
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964			
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866	
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535

48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943